



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rumah Murah Rorotan Batal Masuk Program DKI

Peresmian tetap dilakukan dengan skema sama persis yang diadopsi Anies.

Avit Hidayat

avit.hidayat@tempo.co.id

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik diri dari agenda peresmian pembangunan (*groundbreaking*) perumahan murah di Rorotan, Jakarta Utara, kemarin. Sebanyak 100 unit rumah bertipe 27/45 rencananya dibangun dengan skema uang muka nol rupiah, sesuai dengan program yang dicanangkan Anies.

Kepada wartawan di Balai Kota DKI, kemarin, Anies mengaku tak mengetahui agenda *groundbreaking* pembangunan rumah tapak tersebut. "Yang bilang hari ini siapa?" kata Anies, baik bertanya.

Dia justru menegaskan bahwa pembangunan rumah tapak di Rorotan bukanlah program pemerintah DKI. Kata dia, perumahan itu dibangun PT Nusa Indah Kirana, perusahaan properti yang memiliki aset seluas ratusan hektare di Jakarta. Dia mengaku masih menunggu kejelasan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah pusat sebelumnya menyarankan agar DKI membuat payung hukum yang akan mengatur skema pembiayaan FLPP secara jangka panjang. Dalam kaitan dengan langkah itu, pemerintah DKI berkewajiban membentuk badan layanan umum daerah sebagai pengelola program rumah tanpa uang muka tersebut.

Pernyataan Anies kemarin bertolak belakang dengan wakilnya, Sandiaga Uno. Beberapa hari sebelumnya, Sandiaga menyatakan pemerintah DKI sudah akan memiliki proyek pembangunan rumah tapak tanpa uang muka pada akhir Februari. Hal itu menyusul proyek yang sudah dimulai berupa rumah susun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada awal Januari lalu.

Kemarin, Sandiaga mengungkapkan adanya koordinasi ulang dengan Gubernur Anies untuk rencana *groundbreaking* di Rorotan. Rapat, yang berlangsung sampai tengah malam, ia akui membahas harga rumah yang akan ditawarkan ke masyarakat. Menurut dia, belum ada sinkronisasi terhadap skema

uang muka nol rupiah saat ini.

"Arahan saya jangan dipaksakan. Kalau memang ada yang belum sinkron, tunda saja dulu," ujar Sandiaga.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Agustino Darmawan, menegaskan pembangunan oleh PT Nusa Indah Kirana bukanlah program FLPP. "Itu murni dari pengembang yang mau melakukan *down payment* nol rupiah," ujar dia. "Tapi itu bukan program pemerintah."

Akhirnya, peresmian pembangunan di Rorotan kemarin berjalan tanpa kehadiran Anies maupun Sandiaga. Acara diadakan di Jalan Malaka IV dengan hanya diikuti Wakil Wali Kota Jakarta Utara Junaedi. Dia enggan berkomentar ihwal keberadaannya di sana, sementara Anies-Sandi batal datang. "Saya cuma diundang," kata Junaedi.

Juru bicara PT Nusa Indah Kirana, Dhiki Kurniawan, mengatakan proyek tersebut memang murni swasta. Dia mengklaim Nusa Kirana hanya ingin mendukung program pemerin-

tah berupa penyediaan rumah tapak tanpa uang muka.

"Pemerintah meminta ada skema pembayaran untuk rumah tapak. Mudah-mudahan dari pemunculan ini akan didukung pemerintah," kata dia.

Berdasarkan keterangan yang diberikan Dhiki, harga rumah dipatok Rp 350 juta per unit. Para pembeli dapat mencicil rumah dengan biaya Rp 2,2-2,4 juta per bulan selama maksimal 20 tahun. "Tidak ada uang muka," ucapnya.

Dhiki menuturkan, pihaknya mencaapkan sejumlah syarat bagi calon pembeli. Syarat tersebut antara lain calon pembeli harus mempunyai kartu tanda penduduk DKI, bergaji maksimal Rp 7 juta, dan belum memiliki rumah sebelumnya. Semuanya tepat sama dengan syarat yang diterapkan Anies untuk pembeli rumah susun tanpa uang muka di Pondok Kelapa. "Kalau gajinya lebih dari Rp 7 juta, akan kami sarankan untuk membeli di tempat lain," ujarnya.

● IRSYAN HASYIM | M. ROSSENO A.J.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Rumah Murah Rorotan Batal Masuk Program DKI

Janji Terganjil Banyak Hal

Anggota Komisi Pembangunan DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan, mengatakan pembatalan peresmian proyek rumah murah tanpa uang muka di Rorotan oleh Gubernur Anies Baswedan kemarin merupakan cermin konsep program yang tidak jelas. "Saya melihat ini hanya janji-janji *doang*, pelaksanaannya bermasalah," tutur dia.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, memperingatkan ihwal skema dana talangan untuk uang muka sebesar satu persen oleh pemerintah dalam program yang sama. Menurut dia, yang bisa dilakukan pemerintah hanya mempermudah regulasi pembelian dan mendorong kebijakan perbankan. "Kalau sampai ada dana talangan dari APBD, itu penyalahgunaan wewenang," kata Firdaus.

Berikut ini janji dan ganjilan yang dihadapi Gubernur Anies:

JANJI

1. Program DP nol rupiah adalah kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
2. Program ini mengganti prasyarat uang muka yang sangat mahal dengan prasyarat lain untuk memastikan pembayaran kredit lebih dapat dipenuhi oleh masyarakat.
3. Dalam program DP nol rupiah, bank tetap mendapat uang muka. Tapi dana itu ditanggung (ditalangi atau disubsidi) pihak lain, dalam hal ini pemerintah DKI Jakarta.

GANJILAN

1. Rencana mengambil anggaran dari APBD untuk dana talangan uang muka dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.
2. Program dianggap tidak memiliki kajian, studi, serta kelayakan pelayanan masyarakat secara jangka panjang.
3. Penunjukan swasta sebagai pengembang berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang menguntungkan swasta.
4. Pembentukan badan layanan umum daerahi tak kunjung rampung.

TEKS: ANI HIDAYATI SUMBER DOLAH